

## **Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah**

**Irfan Ferdiansyah<sup>1</sup>, Dwi Risma Deviyanti<sup>2</sup>, Salmah Pattisahusiwa<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>1</sup>Email: [Irfan.ferdiansyah@mhs.feb.unmul.ac.id](mailto:Irfan.ferdiansyah@mhs.feb.unmul.ac.id)

<sup>2</sup>Email: [dwi.risma.deviyanti@feb.unmul.ac.id](mailto:dwi.risma.deviyanti@feb.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [salmah.pattisahusiwa@feb.unmul.ac.id](mailto:salmah.pattisahusiwa@feb.unmul.ac.id)

### **Abstrak**

Wujud dari perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari pusat dan bersumber dari pendapatan APBN dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan kesimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata Kunci:** Pendapatan asli daerah; dana alokasi umum; dana alokasi khusus; dana perimbangan; dan belanja daerah

### ***The influence of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, and balancing funds on regional expenditure***

#### **Abstract**

*The form of the financial balance is the balance of funds consisting of General Allocation Funds and Special Allocation Funds originating from the center and sourced from APBN revenues in order to fund the implementation of decentralization in order to create a financial balance between central and local governments that have a relatively small Local Revenue. The purpose of this study is to prove empirically about the influence of the Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Balancing Funds on Regional Expenditures of Regency / City Government in East Kalimantan Province. The data used in this study is secondary data in the form of Realization Budget Report of Regional Government in East Kalimantan in 2011-2016. The results of this study indicate that the Special Allocation Fund and General Aocal Funds have an effect on the regional expenditure only on the original regional income and the balancing fund which does not significantly influence the regional expenditure of the regency/city government in East Kalimantan Province.*

**Keywords:** Local Revenue; General Allocation Funds; Special Allocation Funds; Balancing Funds; and Regional Expenditures

## PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004).

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip *money follows function*, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan (Bawono dan Novelsyah, 2012 : 16-17). Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Rini, 2011).

Selain berasal dari dana perimbangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Namun fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan / kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan / kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

PAD, DAU, DAK, dan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Tabel 1. Penerimaan PAD, DAU, DAK, dan Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2011 – 2016

Sumber	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
PAD	3.984.051,53	4.690.480,12	5.543.616,58	5.771.201,83	5.095.145,98	5.089.508,17
DAU	51.446,85	52.637,76	55.539,34	57.312,52	-	80.402,18
DAK	38.188,10	34.616,13	8.047,84	1.383,90	218.651,35	1.011.082,81
DP	4.349.207,50	5.396.169,89	5.973.586,17	5.053.998,62	4.918.899,81	5.186.846,14
Total	8.422.893,98	10.173.903,90	11.580.789,93	10.883.896,87	10.232.697,14	11.367.839,30

Sumber: APBD Pemprov Kaltim (2017)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005).

Selama ini alokasi belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD. Dalam Pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD.” Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Pratiwi (2009) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa). Penelitian ini ingin membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun berjalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten / kota di Kalimantan Timur.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2009) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten / kota di Kalimantan Timur.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah**

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian SMERU (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhirman (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten / kota di Kalimantan Timur.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Wulansari (2015) dan Ferdian (2013) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah juga meningkat. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

## **METODE**

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Dalam definisi operasional ini penulis akan memberikan gambaran-gambaran secara jelas mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti maka diperlukan penjabaran dalam bentuk operasionalnya sebagai berikut:

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Wiyono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Ratio dengan satuan rupiah.

**Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Wiyono, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah, Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>), Dana Alokasi Khusus (X<sub>3</sub>), dan Dana Perimbangan (X<sub>4</sub>).

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 Kabupaten dan 3 Kota. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, artinya bahwa populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai yang di kehendaki oleh peneliti.

**Analisis Data**

**Uji Asumsi Klasik**

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dengan *test Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik.

**Uji Normalitas**

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan metode one sample kolmogorov-smirnov test, uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorav-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016:30).

**Uji Multikolilearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih beasar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:103).

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

**Hasil Uji Autokolerasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Koefisien Determinasi**

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 <sup>a</sup>	.821	.808	799827.862

a. Predictors: (Constant), X<sub>4</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>3</sub>

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah

Berdasarkan output diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,821. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yaitu PAD, DAK, DAU, dan Dana Perimbangan mampu mempengaruhi variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 82,1%.

## Uji F

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 3. ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,619E+14	4	4,047E+13	63,254	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3,518E+13	55	6,397E+11		
	Total	1,970E+14	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

Sumber: Data diolah

Tabel ini menunjukkan hasil uji F sebesar 63,254 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti secara bersama-sama variabel PAD, DAU, DAK, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Maka dapat dikatakan bahwa model layak untuk di estimasi.

## Uji t

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4. Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,711	2,519		1,870	,067
	X1	1,016	,433	,138	2,349	,022
	X2	-,310	,576	-,032	-,539	,592
	X3	-,719	1,565	-,029	-,459	,648
	X4	1,383	,097	,882	14,224	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur". Hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,02 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nur Indah Rahmawati (2010), yang menemukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja langsung menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja daerah juga akan menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja menurun karena belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah.

Bambang Prakosa (2014) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar deficit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002:183). Seperti yang diketahui belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil

penelitian diatas, maka semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

### **Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,592 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga gagal membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011-2013 kabupaten Mahakam Ulu tidak menyampaikan laporan Realisasi APBD sehingga mempengaruhi hasil perhitungan data pada penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2009), yang mengemukakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dengan pemahaman bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) ke Pemda berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan Pemda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar (2012) yang menyebutkan secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Abdul Halim (2009:34) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

### **Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.”. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,648 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dalam penelitian ini mengetahui bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011-2013 kabupaten Mahakam Ulu tidak menyampaikan laporan Realisasi APBD sehingga mempengaruhi hasil perhitungan data pada penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Suhirman (2013) yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah Kab/Kota Kaltim.

Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Didapat oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu kebutuhan sulit diperkirakan dengan alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Namun pemerintah daerah yang menerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

### **Hubungan Dana Perimbangan Dengan Belanja Daerah**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.”. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Perimbangan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulansari (2015) dan Ferdian (2013). Dengan hasil ini dapat diasumsikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada dana perimbangan sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dari sumber pendanaan melalui pendapatan asli daerah kurang mampu membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan masih bergantung kepada dana perimbangan dari pusat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis yang diperoleh bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Perimbangan tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adventino, Yohanes Eko. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. Skripsi S1. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kaltim. 2017 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kaltim 2011-2016, BPS, Kaltim.
- Farizi, Sina Muhammad Salman. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada 9 Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Universitas Komputer Indonesia.
- Ferdian, Yuriko. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Padang
- Kusnandar. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Malang
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Cetakan Kelima. BPUNDIP. Semarang.
- Ignia, Gregorius. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap belanja Daerah di Kabupaten Bengkayang. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Oktiniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi tidak dipublikasikan.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIIO ; Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sahnun, Suhirman. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur. Skripsi S1. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Wiyono, Gendro. (2011). 3 In One: Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS, 2.0 Edisi 1. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Wulansari, Dessy Tri. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Tahun 2012 – 2013. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.